

Judul : Perlu koordinasi lintas sektoral, DPR janji perjuangkan guru madrasah swasta jadi PPPK
Tanggal : Senin, 02 Maret 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Perlu Koordinasi Lintas Sektoral

DPR Janji Perjuangkan Guru Madrasah Swasta Jadi PPPK

Wakil Ketua DPR Sari Yulianti berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi guru madrasah swasta agar dapat diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Terlebih, dirinya pernah bersekolah di madrasah, sehingga memahami betul perasaan mereka.

"SAYA juga telah menerima langsung demonstrasi damai guru madrasah swasta. Mereka adalah keluarga besar saya," ujar Sari, kemarin. Diketahui, Kementerian Agama (Kemenag) telah mengusulkan agar 630 ribu guru madrasah swasta diangkat menjadi PPPK.

Sari menegaskan komitmennya itu bukan basa basi. Apalagi saat memimpin langsung pertemuan dengan perwakilan guru madrasah swasta se-Indonesia di Gedung DPR, Rabu (11/2/2026). Dari pertemuan tersebut, DPR memberikan dukungan afirmatif atau penguatan terhadap tuntutan

pengangkatan guru madrasah swasta menjadi PPPK.

Namun, proses tersebut memerlukan koordinasi lintas kementerian, di antaranya Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). "Jadi, kami tidak bisa sendirian. Perlu koordinasi lintas sektor dengan Pemerintah," tegas Bendahara Umum (Bendum) Partai Golkar ini.

Untuk itu, Sari telah mendorong Kemenag segera me-

ngkoordinasikan rapat bersama kementerian dan lembaga terkait seperti, Kementerian PAN-RB, BKN dan Kemenkeu untuk merealisasikan kebijakan ini. "Langkah percepatan teknis implementasi menjadi fokus utama bagi semua pihak terkait," kata legislator asal daerah pemilihan (dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB) ini.

Selain itu, dia menyoroti isu belum cairnya pembayaran tunjangan profesi guru (TPG). Namun, berdasarkan penjelasan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis), secara politik dan anggaran kebijakan tersebut telah tersedia. "Hanya diperlukan percepatan teknis implementasi," ucapnya.

Sementara, Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kemenag, Amien Suyitno mengatakan, usulan sebanyak 630 ribu guru madrasah swasta

diangkat menjadi PPPK tengah diproses bersama kementerian dan lembaga terkait. Proses pengangkatan tetap akan mengikuti aturan dan kewenangan yang berlaku.

"Proses pengusulan formasi tersebut memerlukan koordinasi dengan kementerian terkait dan harus berjalan sesuai regulasi yang berlaku," ucap Amien dalam keterangannya, Jumat (27/2/2026).

Terkait belum cairnya tunjangan profesi guru, Amien beralasan, Anggaran Belanja Tambahan (ABT) membutuhkan review dahulu di Kemenkeu. Karena secara aturan, anggaran untuk tunjangan guru belum bisa diajukan apabila Pendidikan Profesi Guru (PPG) masih berlangsung, sehingga harus menunggu kelulusan. "Jadi hanya menyangkut prosedural, ini kan baru diumumkan kelulusannya," jelas Amien.

Setelah para guru lulus, kata

Amien, Kemenag baru mengajukan anggaran tunjangan profesi guru sesuai dengan kebutuhan belanja pegawainya. "Jadi memang begitu, PPG kan akhir tahun (2025), enggak mungkin kami ajukan anggaran di akhir tahun," ujar dia.

Namun demikian, dia memastikan proses pencairan tunjangan profesi guru madrasah sebenarnya tidak ada masalah anggaran. Karena semua harus sesuai dengan tahapan prosedur yang ada. "Jadi semua pengajuan direview dulu," ujarnya.

Untuk itu, ia berharap, para guru madrasah yang tunjangan profesinya belum cair dapat memahami dengan penjelasan tersebut. Karena setiap anggaran yang diajukan pada tahun sebelumnya, maka tunjangan untuk tahun berikutnya. "Kita harus edukasi masyarakat. Jadi artinya sesuai aturannya memang begitu," tutup Amien. ■ TIF